



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/368/B.III/HK/2016

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu menetapkan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI.**

KESATU : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi karena bertentangan dengan Pasal 14 dan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

- KEDUA** : Bupati Lampung Tengah segera berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Lampung Tengah untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
- KETIGA** : Apabila penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah masih memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi yang dibatalkan, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Dalam hal Bupati Lampung Tengah dan/atau DPRD Kabupaten Lampung Tengah tidak dapat menerima keputusan Gubernur ini dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang undangan Bupati Lampung Tengah dan/atau DPRD Kabupaten Lampung Tengah, dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Keputusan Gubernur ini diterima.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 - 6 - 2016.

GOVERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih.